

Change social
Theories Social
social change
Differences perspectives
course
students
Differences perspectives
Theories Social
social change

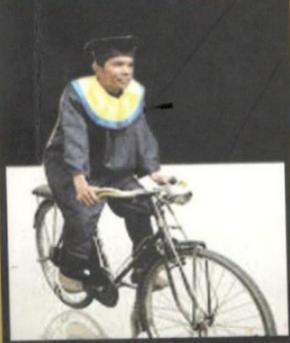


KAMPUS, MASYARAKAT DAN PERUBAHAN

"Aku" dan PENGALAMAN BELAJAR BERSAMA SILE/LLD PROJECT



ALUMNI SHORT COURSE SILE/LLD PROJECT



KAMPUS, MASYARAKAT DAN PERUBAHAN

"Aku" dan Pengalaman Belajar bersama SILE/LLD Project

Alumni Short Course SILE/LLD Project



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA



SILE/LLD UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

KAMPUS, MASYARAKAT DAN PERUBAHAN

"Aku" dan Pengalaman Belajar bersama SILE/LLD Project

Para Penulis

Bagian Kesatu

Wahidah Zein Br. Siregar
A. Najibul Khoiri
Ali Mufrodi
Abdul Quddus Salam
Endratno P. Swasono
Moh. Hanafi
M. Ahsan

Bagian Ketiga

Ahmad Siddiq
Samsul Anam
Hammis Syafaq
Nasruddin
Fathan Aniq

Catatan Penutup

Nadhir Salahuddin

Penyunting & Penata Letak

Sulanam

Desain Cover

Abdullah Mahfudz Nazal

Cetakan 1, 2015

15x23 cm, xviii + 526 hlm.

ISBN: 978-602-71375-4-7

Diterbitkan oleh:

SILE/LLD UIN Sunan Ampel Surabaya
Wisma Transit Dosen Lantai III, Kampus UIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani 117 Surabaya, 60237

Kata Pengantar

Buku yang sedang anda baca ini merupakan bagian penting dari ikhtiar *SILE/LLD project* untuk mengabdikan dan menyebarkan berbagai hasil-hasil yang telah diperolehnya. Sebagai sebuah *project* yang tidak membangun fisik, tentu kehadiran semacam buku dan rekaman peristiwa tertulis menjadi sesuatu yang cukup berharga. Mengingat kadar ingatan kita terhadap non-fisik jauh berbeda dengan mengingat sesuatu yang fisik. Apa yang tak tampak secara fisik umumnya mudah terlupakan dan mudah diputarbalikkan. Mungkin disinilah posisi lain dari hadirnya buku ini. Menjadi penanda peristiwa bahwa kita semua pernah belajar dalam bingkai SILE/LLD.

Penulisan buku ini dimulai dari kegiatan KM Arisan Tulisan. KM adalah kepanjangan dari *knowledge management*, merupakan salah satu *cross-cutting issues* dalam *project* ini. Arisan tulisan menjadi salah satu kegiatan diseminasi hasil *project* dengan tujuan membukukan tulisan-tulisan yang berasal dari pengalaman belajar bersama SILE/LLD.

Arisan tulisan adalah model kegiatan penulisan yang diikuti sejumlah alumni *shortcourse* SILE/LLD di Kanada dan Filipina. Mereka berkumpul dan membahas alur, sistematika, isi, dan tenggat waktu penulisan pengalamannya selama masa kursus. Untuk sampai pada hadirnya sebuah buku, kegiatan arisan tulisan dihelat sampai tiga kali. Kegiatan pertama berisi kesepakatan-kesepakatan bentuk tulisan, kegiatan kedua berisi laporan perkembangan tulisan, dan kegiatan terakhir berisi telaah sejawat.

Semua itu bukanlah perkara mudah, karena juga dibutuhkan ketelatenan untuk berkomunikasi dengan penulis; menanyakan perkembangan, menyemangati agar tetap gigih menulis, juga memberikan ruang diskusi yang memadai.

Tulisan yang ada di buku ini, akhirnya berhasil dikumpulkan dari dua puluh lima orang dari dua puluh sembilan orang yang ditarget. Jumlah ini sudah sangat luar biasa, mengingat para penulis yang terlibat adalah orang-orang yang super sibuk di kampus ini. Atas keberhasilan terbitnya buku ini, kami mengucapkan terimakasih yang luar biasa kepada para pihak yang telah turut berkontribusi dalam penulisan buku ini.

Kepada para penulis yang telah meluangkan waktu dan utamanya mengingat kembali pengalaman yang telah setahun mengendap. Ini bukanlah perkara mudah. Masa yang telah lewat dan diingat kembali juga berarti akan menghilangkan pernik kecil dan peristiwa tertentu. Tentu saja, hasilnya akan berbeda jika ditulis secara langsung selang peristiwa itu terjadi.

Akhirnya, semoga sesuatu yang sederhana ini—dengan segala kesederhanaannya—dapat memantik kebaikan. Dapat menjadi alat yang menular ke mereka yang mau mengambil pelajaran berharga yang terserak dalam isi buku ini.

Surabaya, Mei 2015
LPIU, SILE/LLD UIN Sunan Ampel Surabaya
Ketua,

Nabiela Nailly, MA

Catatan Penyunting “Aku” dan Pengalaman Belajar yang “Ku”tulis

Mulanya adalah sebuah perjalanan; membaca pengumuman, memilih materi kursus, mendaftar, mengisi formulir, lalu mengikuti seleksi. Lolos dan berangkat. Semuanya bermula dari sebuah aktifitas yang sederhana. Lalu diberi muatan khusus, maka jadilah perjalanan yang gagah menuntut ilmu, meski singkat. Rata-rata dua minggu sampai dua bulan, kecuali program diploma yang ditempuh minimal enam bulan. Tempatnya pun jauh. Butuh 25 jam dengan pesawat terbang untuk sampai di tempat itu. Kanada. Semua itu terjadi atas dukungan dari *SILE/LLD project*.

Jarak yang amat jauh tersebut, senyatanya juga berdampak pada antar budaya yang berbeda. Kebiasaan, cara bertahan hidup, pola hidup serta pola menjalankan keyakinan juga membutuhkan penyesuaian tersendiri. Beban ini, tampaknya semakin berat karena mereka yang berperjalanan untuk belajar ini juga dituntut serius menyerap aneka ilmu di negeri yang berbeda ini. Saat pulang, mereka juga dituntut untuk menyebarluaskan hasil yang telah dipelajari. Apa mereka menjadi ciut nyali? Tidak. Justru mereka semakin ingar-bingar menularkan berbagai pengalamannya. Apakah itu sejenis *euphoria*? Entahlah. Karena ilmu yang bermanfaat juga berarti ilmu yang dapat dibagikan dan dipakai.

Mulanya adalah menuntut ilmu. Lalu didorong untuk ditulis dengan menggunakan bahasa bertutur dan mengalir. Tulisan itupun lebih banyak bercerita tentang

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Catatan Penyunting	vii
Daftar Isi	xv

Bagian Kesatu: Mengelola Pengetahuan untuk Menguatkan Tata Kelola	1
Wahidah Zein Br. Siregar <i>Learning Organiza- tion (LO) sebagai Sarana Pengembangan Know- ledge Management (KM)</i>	3
A. Najibul Khoiri <i>Belajar Good Governance di Pesisir.....</i>	23
Ali Mufrodi <i>Penelitian Terapan bagi Perluasan Kerjasama Kampus</i>	43
Abdul Quddus Salam <i>Memanfaatkan Social Accountability Tools</i>	53
Endratno P. Swasono <i>Semua Belajar, Semua dapat Berbenah</i>	69
Moh. Hanafi <i>Community Based Research; Gandeng Tangan Kampus-Komunitas menuju Perubahan</i>	79
Muhamad Ahsan <i>Rantai Nilai Jagung; Siapa yang Menanggung Untung?</i>	99

Bagian Kedua: Pendekatan Aset untuk Pengem- bangan	123
Wahyu Ilaihi <i>Membumikan Pendekatan Aset di Perguruan Tinggi</i>	125
Advan Navis Zubaidi <i>Menyemai ABCD; Segalanya adalah Bernilai</i>	141

Rizka Safriyani Belajar Menambal Ember Bocor di Nova Scotia, Kanada	157
Amal Taufiq Manisnya Pepaya California, <i>The Real Low Hanging Fruit</i>	177
Mohammad Ansori Keniscayaan Sebuah Kemitraan.....	193
Bagian Ketiga: Konflik Sosial dan Pembangunan Perdamaian	213
Akhmad Siddiq Jalan Panjang Membangun Perdamaian; Catatan Perjalanan dari Mindanao ke Karang Gayam.....	215
Samsul Anam Trauma Anak di Tengah Konflik	235
Hammi Syafaq Ungkapan Kebencian dan Dampaknya bagi Proses Perdamaian; Pengalaman dari Mindanao dan Kopolnas	255
Nasruddin Resolusi Konflik Keagamaan melalui 'ABC Triangle Method'	271
Ahmad Fathan Aniq Peace Education sebagai Tool untuk Membangun Masyarakat Anti Kekerasan	293
Bagian Keempat: Menggugah Kesadaran dan Partisipasi Komunitas	309
Ah. Fajruddin Fatwa Advokasi Sosial Petani; Mengurai Alur Konflik untuk Perdamain	311
Bambang Catur Nusantara Model Advokasi Kampus - CSO; Bekerja bersama Komunitas Pesisir Nambangan	339
Fatikul Himami <i>Civic Education a la Pondok Pesantren MAS Sidoarjo</i>	379

Eni Purwati Menjadi Fasilitator untuk Perubahan Masyarakat	399
Ahmad Mansur Menjadi Kreatif dengan Pendekatan FTACC	417
M. Helmi Umam <i>National Center for Civic Education</i> ; Inisiasi Penguatan Pondasi Kebangsaan dari UIN Sunan Ampel	433
Nabiela Nailly CU Expo 2013, It is a movement, not (only) a Conference; Refleksi pengalaman di CU Expo 2013.....	455
Catatan Penutup: Menguatkan UCE dalam Rencana Strategis Perguruan Tinggi	487
Nadhir Salahuddin Merencanakan Perubahan di Perguruan Tinggi; Pengalaman UIN SA Mengembangkan Rencana Strategis <i>University Community Engagement</i>	489
Daftar Bacaan	523

orang yang mau mendengar cerita saya". Di kesempatan lain ada lagi seorang mahasiswa yang berkata kepada saya, "ibu ternyata walaupun dengan gemetar saya bisa juga berbicara di depan kelas. Saya paling takut berbicara bu...".

Sekali lagi LO memberi peluang pada siapa saja untuk saling belajar, mengenal potensi satu dan lainnya, membangkitkan sikap saling menghargai. LO dapat membantu berkembangnya KM. Semoga kita semua dapat selalu menjadi orang-orang yang suka membagi pengetahuan dan ketrampilannya kepada orang lain, suka belajar berbagai pengetahuan dan ketrampilan dari orang-orang lainnya, serta suka memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Hidup tentu akan menjadi lebih mudah dan indah jika banyak orang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan berada di tengah-tengah kita. Orang-orang tersebut juga adalah orang-orang yang suka membantu dan bekerja sama. LO membantu kita mengakumulasi pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, memetakan pengetahuan-pengetahuan tersebut, mengarsipkannya dengan baik, dan menggunakannya untuk kebaikan diri dan orang lain. Dengan demikian, LO dapat membantu kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang lainnya. {}

Belajar Good Governance di Pesisir

A. Najibul Khoiri

Saya lupa kapan tepatnya pengumuman kelulusan yang berhak ikut workshop di Coady International Institute. Yang pasti, saat itu saya tidak percaya ketika kolega saya, yang *notabene* penggemar berat klub sepakbola yang identik dengan warna Merah di ranah Ratu Elizabeth mengirim pesan singkat yang mengatakan bahwa saya dinyatakan lulus. "Kwek, liat email. Kamu lulus. Selamat. Dan Alhamdulillah, saya juga akan berangkat ke Davao". Senyum sumringah itu pasti. Terbayang, saya harus mengangkasa setidaknya selama 25 jam untuk menyentuh tanah wilayah, Nova Scotia, Canada. Melelahkan, dan tentunya menyenangkan.

Tidak hanya itu, saya juga mereka-reka, kira-kira apa saja yang akan saya dapat dari dua kursus yang telah saya pilih sebelum test seleksi. Pilihan pertama adalah Program *Community-Based Conflict Transformation and Peacebuilding*. Dengan landasan bahwa program tersebut

membahas teori-teori perdamaian, bagaimana menganalisa dan menyelesaikan suatu permasalahan.

Program ini juga menawarkan bagaimana melakukan komunikasi nir-kekerasan dan cara-cara mediasi yang tepat untuk menyelesaikan konflik, sehingga para pemimpin atau tokoh-tokoh perdamaian bisa membuat suatu kebijakan yang menjamin keberlangsungan suatu perdamaian. Pilihan *kedua* adalah program *Building on Local & Indigenous Knowledge for Community Resilience*. Kursus ini memfokuskan bagaimana memanfaatkan nilai-nilai dan budaya lokal untuk dijadikan landasan utama dalam pembangunan masyarakat setempat.

Tujuannya untuk menghargai dan menghormati komunitas dan pengetahuan lokal sehingga terjalin hubungan dan kebersamaan antar komunitas. *Outcome* yang diharapkan, agar setiap peserta mampu menganalisa dan memanfaatkan nilai-nilai lokal dalam proses pengembangan dan pembangunan masyarakat setempat. Berinovasi tiada henti dalam pengembangan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nilai-nilai modernitas dan menerapkannya secara bersamaan. Pada akhirnya, peserta diharapkan mampu mencari cara terbaik untuk pengembangan masyarakat secara efektif dan akuntabel.

Bagi saya, dua program tersebut saling berkaitan dan saling mendukung untuk membangun dan memberdayakan masyarakat. Namun, ketika pengisian formulir pendaftaran ke Coady International Institute pilihan saya goyah. Saya pun berkelana di dunia maya menjelajahi website <http://www.coady.stfx.ca/coady/>,

untuk mencari informasi tentang program kursus yang tersedia.

Ternyata pilihan program kursus tidak hanya terbatas pada tiga program yang ditawarkan oleh pihak SILE (Seperti yang diumumkan di websie UIN Sunan Ampel, pada tanggal 7 Maret 2013). Coady International Institute menawarkan beberapa program sertifikat pada periode musim semi 2013. Diantaranya, *Building on Local & Indigenous Knowledge for Community Resilience*; *Community-Based Conflict Transformation & Peacebuilding*; *Facilitation & Training Approaches for Community Change*; *Asset-Based Community-Driven Development (ABCD)*; *Learning Organizations and Change*; *Partnerships & Multi-Stakeholder Relationships*; *Building Assets & Agency for Citizen-Led Development*, *Citizen-Led Accountability: Strategies & Tools*; *Integrating Food Justice into Community Programs*; dan *Good Governance and Social Accountability Tools*.

Mengingat banyak teman-teman dari kolega yang mengambil program *Community-Based Conflict Transformation & Peacebuilding*, maka ada baiknya jika saya mencari alternatif lain agar tidak semua dosen peserta dari IAIN fokus pada satu program saja. Itung-itung, bagi-bagi kursi (*program*).

Saya berkonsultasi dengan Sunaryo, Project Officer SILE Surabaya tentang keinginan saya untuk mengubah program sertifikat yang akan saya ikuti. Setelah mendapat lampu hijau dari beliau. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar pada program sertifikat *Good Governance and Social Accountability Tools*.

Dari hasil bacaan saya di prospektus Coady, program ini secara umum menekankan bagaimana agar tata kelola pemerintahan (dalam lingkup yang luas), ataupun suatu sistem suatu organisasi dijalankan dengan

baik dan benar, sehingga masyarakat bisa ikut serta berpartisipasi demi terciptanya layanan publik yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaannya selama 5 hari, dari tanggal 27-31 Mei 2013. Tujuannya adalah:

- a. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan peserta kursus tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Mengajak masyarakat ikut serta dalam proses monitoring pemerintahan.
- c. Peserta diharapkan bisa:
- d. Menguasai beberapa metode atau pendekatan akuntabilitas sosial.
- e. Penerapan metode akuntabilitas sosial dalam masyarakat sebagai landasan utama untuk perubahan.
- f. Kemampuan untuk mengkritisi dan menilai kualitas program kerja pemerintahan

Dalam persepsi saya, jika dipraktekkan dalam lingkup kecil (misalnya kampus), materi-materi yang dipelajari sangat bermanfaat untuk tata kelola dan administrasi UIN, termasuk juga dengan melibatkan mahasiswa demi terciptanya good governance dalam kampus.

Alhamdulillah, ternyata saya tidak sendiri yang memilih program *Good Governance and Social Accountability Tools*. Saudara, Abdul Quddus Abdussalam (Saya panggil mas Quddus) dari Lakpesdam PWNU Jawa Timur, juga ikut program ini. Beliau sangat berpengalaman dan sering terjun langsung dalam proses advokasi pelaksanaan *good governance* dan menerapkan model-model akuntabilitas sosial dalam organisasi dan pemerintahan. Saya, sebagai orang yang baru sangat terbantu dengan keberadaan beliau dalam memahami materi-materi yang disampaikan oleh para instruktur.

“Menjelajahi” Dunia

Bertepatan dengan hari Waisak, Sabtu, tanggal 25 Mei 2013, *Long Journey* pun dimulai! Sesuai *print-out* tiket yang saya terima, *itinerary* perjalanannya adalah Surabaya - Armsterdam - Toronto - Halifax (Nova Scotia). Lebih dari 25 jam berada diatas awan dengan melewati tiga benua sekaligus, dengan jarak kurang lebih 20.000 Km. Jika saya lihat dari *globe*, perjalanan tersebut telah mengitari separuh dunia. Ketika *touched down* di bandara Halifax, lega rasanya. Saya beranggapan berakhir sudah perjalanan yang melelahkan tersebut. Di bandara Halifax, kami (saat itu kami bertiga, saya, Quddus dan peserta dari UIN Makassar) dijemput oleh petugas dari Coady International Institute. *Oh God!!!* Gumam saya. Dugaan saya keliru. Ternyata belum sampe juga. Tujuan akhirnya adalah Antigonish, 250 Km dari Halifax. Kabar baiknya, tidak ada istilah macet di wilayah yang luas dan minim penghuni ini. Lalu lintas dan kondisi jalan ibarat sirkuit MotoGP atau Formula One. Mulus dan melompong. Sangat jarang sekali berpapasan dengan kendaraan lain, apalagi saat itu hari mulai senja. Sang sopir bisa menggeber kecepatan kendaraannya secara maksimal, sehingga dalam tempo 2 jam-an kami sudah tiba di komplek *student hostel*-nya St. Francis Xavier University.

Saat tiba, kami langsung diantar ke kamar yang telah ditentukan. Dalam kamar sudah tersedia buku panduan program, beberapa buku referensi, password untuk akses wi-fi. Alur pemberangkatan (mulai dari proses pengurusan visa - perjalanan - penjemputan - dan penyambutan di kampus) saya kategorikan sebagai suatu proses yang sangat terencana dan matang. Jika saya mengait-ngaitkan, proses tersebut adalah salah satu

contoh kecil aplikasi dari tata kelola yang baik dan akuntabel.

Saya tiba pada hari Sabtu sekitar jam 17.00 waktu setempat. Sehingga saya masih bisa menikmati *free time* di hari Minggu. Untungnya, Brodin, senior yang tiba duluan seminggu sebelumnya, dengan ikhlas mau menjadi *guide* kami untuk meng-*explore* dan *blusukan* wilayah sekitar kampus St. Francis Xavier University. Acung jempol buat senior, walaupun baru seminggu tapi sudah hafal tempat-tempat penting dan sudut-sudut kota Antigonish yang super sepi.

Pada hari Senin, 27 Mei 2013, kelas *Good Governance and Social Accountability Tools* dimulai. Sebagai fasilitator adalah Olga Gladkikh, *Senior Program Staff, Advocacy & Citizen Engagement* di Coady International Institute, St. Francis Xavier University. Kedua, Carmen Malena, Senior staff di *Civics: World Alliance for Citizen Participation*, dan penulis buku *From Political Won't to Political Will: Building Support for Participatory Governance*. Mereka dibantu oleh John Gaventa, selaku direktur utama Coady International Institute.

Peserta berjumlah sekitar 28 orang yang berasal dari berbagai negara yang mayoritasnya dari negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Indonesia, Filipina, Afghanistan, Pakistan, India, Mesir, Nigeria, Kamerun, Somalia, Ethiopia, Kenya, Mexico, Brazil, Argentina, Haiti dan beberapa negara lainnya. Mayoritas dari peserta adalah tokoh-tokoh berpengaruh dan mempunyai kedudukan yang sangat penting di negara masing-masing. Sangat disayangkan, hanya ada 1 peserta dari negara maju, yaitu Canada. Analisa saya, lebih tepatnya dugaan saya, persoalan *good governance* dan *social*

accountability menjadi isu utama atau mungkin juga problem pelik yang harus di selesaikan dalam pemerintahan mereka (negara berkembang/dunia ketiga). Namun lain halnya bagi negara maju, kemungkinan, persoalan tersebut sudah mereka lalui.

Metode pembelajaran yang disampaikan bervariasi dan sangat menarik, dan berpusat pada peserta. Teori dengan ceramah, diskusi tematik atau kasus (Kelompok kecil maupun besar), bermain peran, berbagi pengalaman antar sesama peserta, penugasan dan presentasi. Tak lupa, diselingi dengan game-game yang menarik sehingga para peserta tidak bosan. Suasana kelas terorganisir dengan baik dan dipersiapkan secara matang, dan bentuk kelas bisa diatur secara periodik dan tidak monoton.

Secara umum, stressing point dalam program ini adalah:

- a. Fokus pada tata kelola pemerintahan
- b. Setiap peserta diharuskan untuk menyampaikan pengalaman atau memberi informasi kepada peserta lain tentang tata kelola pemerintahan di daerah masing-masing, apakah dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* atau tidak.
- c. Setiap peserta diharuskan untuk memberi contoh bagaimana seharusnya menerapkan *good governance*.
- d. Peserta diberi tugas untuk mengambil salah satu contoh kasus kemudian diuji dengan metode-metode akuntabilitas sosial dalam bentuk paper dan mempresentasikannya dalam kelas.

Dengan banyaknya peserta dari berbagai negara tersebut, walaupun mayoritas dari negara berkembang, saya pribadi merasa telah "menjelajahi" dunia. Karena

saya bisa bertatap muka, berinteraksi selama seminggu lebih dan berbagi pengalaman dengan sosok-sosok penting dan berpengaruh di negara masing-masing. Apalagi saat mereka mempresentasikan pengalamannya dalam menghadapi problem tata kelola pemerintahan dan bagaimana cara memecahkannya. Ya, benar, saya telah menjelajahi berbagai negara, walaupun tidak dalam arti sebenarnya.

Good Governance

Secara harfiah berarti Tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut UNDP, *Good Governance* merupakan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik. Singkatnya, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat)

Tabel 1: Materi Kursus Good Governance and Social Accountability Tools

Day 1: Good Governance and Social Accountability: Concepts and Principles.
Day 2: Social Accountability Practices and Tools.
Day 3: Implementing a Community Scorecard
Day 4: Creating an Enabling Environment for Social Accountability
Day 5: From Learning to Action: Applying Social Accountability Practices at Home

Good Governance akan terealisasi jika memenuhi minimal 3 prinsip utama: Pertama, *Partisipasi*. Prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Singkatnya, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Kedua, *Transparansi*. Yaitu keterbukaan dalam tata kelola/penyelenggaraan pemerintahan.

Semua urusan pemerintahan berupa kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik. Ketiga, *Akuntabilitas*. Pendekatan berdasarkan konsep yang bisa dipertanggungjawabkan. Suatu prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Ketiga prinsip tersebut diatas, saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Masing-masing adalah instrumen yang diperlukan untuk prinsip yang lainnya dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik. Beberapa prinsip lain sebagai penopang adalah:

- Pengawasan*: pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Daya Tanggap*: kepekaan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- Profesionalisme*: Profesional dalam pelayanan.
- Efisiensi dan Efektifitas*: Penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
- Kesetaraan*: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat
- Wawasan ke Depan*: Mempunyai visi & strategi yang jelas

- g. *Penegakan Hukum*: Penegakan dan kepastian hukum, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Untuk merealisasikan prinsip-prinsip *Good Governance*, perlu dua motor penggerak yang harus berjalan beriringan. *Pertama*: Lembaga Pemerintahan (Legislatif, Judikatif, Eksekutif). Sebagai lembaga resmi dalam pemerintahan, diharapkan mampu mempromosikan transparansi, dan akuntabilitas dengan membentuk lembaga-lembaga demokratis yang melibatkan organisasi masyarakat sipil. Sehingga tercipta mekanisme pertanggungjawaban sosial dalam fungsi pemerintah. *Kedua*: Masyarakat (organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, LSM, media dll). Fungsi kelompok *civil society* ini untuk memonitor layanan publik, memonitor anggaran dan kinerja pemerintah, evaluasi kebijakan dan kinerja pemerintah, serta memberi usulan dan program kerja sesuai kebutuhan dan keperluan masyarakat.

Social Accountability

Definisi Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan kelembagaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak/masyarakat. *Upward Accountability* (Akuntabilitas ke atas), *Downward Accountability* (Akuntabilitas ke bawah), *Outward Accountability* (Akuntabilitas ke luar), *Vertical Accountability* (Akuntabilitas Vertikal), *Horizontal Accountability*, *Mutual Accountability* dan *Social Accountability*.

Sesuai dengan nama programnya, materi kuliah fokus pada *Social Accountability*. Yaitu sebuah pende-

katan terhadap sebuah akuntabilitas yang bergantung pada partisipasi masyarakat, di mana warga biasa dan / atau kelompok masyarakat tertentu yang secara langsung ataupun tidak bersama-sama menuntut akuntabilitas tersebut. Definisi lain menyebutkan, adalah sebuah tindakan dan mekanisme yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok warga untuk mengontrol pejabat publik, politisi, dan penyedia layanan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan kinerja yang mereka lakukan dalam hal pemberian layanan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan melindungi hak-hak rakyat.

Muncul pertanyaan, kenapa harus dengan Akuntabilitas Sosial? Karena, selama ini, mekanisme pertanggungjawaban konvensional (dianggap) telah gagal untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik. Sehingga perlu adanya terobosan baru sebagai model pertanggungjawaban yang mengikutsertakan masyarakat. Terjadi dialog/hubungan aktif antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat bisa menyuarakan aspirasi, mendapatkan informasi atas kebijakan-kebijakan dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Di sisi lain pemerintah responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa akuntabilitas sosial memiliki 4 pilar pokok:

- Kelompok masyarakat yang terorganisir
- Pemerintahan yang responsif (Tanggap).
- Akses terhadap informasi.
- Sensitivitas dan relevansi dengan budaya dan konteks

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan menguatnya demokrasi, berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan dampak langsung dari akuntabilitas sosial. Legitimasi dan

kredibilitas pemerintahan pun meningkat dan bisa dipertanggungjawabkan. Bak sebuah permainan domino, jika taraf dan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan mutu kebijakan, layanan publik, penggunaan anggaran dan mutu pembangunan. Dan muara akhirnya adalah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Tabel 2: Metode Akuntabilitas Sosial

<p>Partisipasi dalam perencanaan pembangunan (Participatory Development Planning)</p> <p>Peran serta masyarakat dalam penentuan program pembangunan. Inisiatif bisa dilakukan oleh pemerintah, NGO dan lain-lain. Musrenbang (contoh di Indonesia). Blusukan Jokowi.</p>
<p>Partisipasi Perencanaan Anggaran</p> <p>Mengajak masyarakat untuk berperan dalam penentuan anggaran program kerja. Kolaborasi antara pemerintah-masyarakat-civil society. Musrenbang.</p>
<p>Audit Sosial</p> <p>Proses → dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Baik pemerintah (penyedia) dan masyarakat (pengguna). Monitoring dampak program kerja atau layanan publik. Contoh audit BOS.</p>
<p>Analisis Anggaran Independen</p> <p>Analisis anggaran yang dilakukan oleh masyarakat, atau kelompok masyarakat tentang anggaran yang digunakan. ICW, FITRA dan lain-lain</p>
<p>Kartu Skor Penilaian Komunitas.</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kualitas layanan publik dengan memberikan skor tertentu. Penyedia dan pengguna masing-masing memberi skor → diskusi bersama</p>

Dalam lingkup IAIN → layanan Akademik, Perpustakaan.

Kartu Laporan Penilaian Masyarakat

Hampir sama dengan Kartu Skor.

Di Indonesia, seperti kartu saran, kuissoner → tindak lanjut bersama.

Monitoring dan Evaluasi (MONEV).

Evaluasi kuantitas dan kualitas layanan publik dan program kerja pemerintah.

Tidak sekedar pengumpulan data, namun untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Bagaimana respon pemerintah terhadap permasalahan HAM, masalah lingkungan, evaluasi kontrak pemerintah dengan pihak-pihak swasta.

Contoh, Sertifikasi Guru. Anggaran (dana) → Benar diterima atau tidak? → Kinerja meningkat? → Murid bertambah? → Penurunan angka buta huruf? → Lulusan dapat kerja?

Tentunya, cita-cita dari akuntabilitas sosial tidak akan pernah tercapai jika tidak ada saling kerjasama antara dua motor penggerak, lembaga pemerintahan dan civil society. Disatu sisi, pemerintah mau dan siap dievaluasi. Dilain pihak, masyarakat tidak apatis, dan mau melakukan evaluasi terhadap pemerintah secara konstruktif. Namun demikian, banyak hambatan dan tantangan menjadi batu ujian terciptanya akuntabilitas sosial, seperti; minimnya waktu dan dana, resistensi dari pihak-pihak yang merasa dievaluasi (pemerintah), masyarakat yang apatis, adanya manipulasi data, dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu, dan (kemungkinan terjadinya *settingan/plot*), serta ancaman terhadap pihak-pihak yang vokal

Evaluasi dan Urun Rembug

“Positif dan bermanfaat,” Itulah kesan saya dalam mengikuti program sertifikat ini. Sangat bagus bagi peserta yang mempunyai *background* birokrat, aktivis sosial, akuntan publik, akademisi, dan profesi lainnya. Walaupun dari sisi konten, mungkin materi-materi yang disampaikan bukanlah hal baru bagi banyak kalangan di Indonesia. Akan tetapi, dengan pertemuan para peserta dari berbagai negara dengan segudang problematikanya menjadi suatu nilai *plus*. Mereka bisa berbagi pengalaman. Bagaimana menghadapi permasalahan dan cara memecahkannya secara baik. Lain ladang lain ilalang. Lain negara lain problemnya dan lain juga cara menanganinya. Dan sangat mungkin sekali cara yang berhasil digunakan di suatu negara bisa *di-copy-paste* untuk negara lain.

Sayangnya, seperti yang telah saya jelaskan di awal tulisan ini, hanya ada satu peserta dari negara maju, yaitu Canada. Sehingga *sharing knowledge* hanya berkulat dari negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Dan juga durasi waktu program yang ditawarkan sangat pendek. Idealnya, program ini dilaksanakan minimal 2 minggu, karena mengingat materi yang banyak dan perlu praktek dan pengayaan informasi.

Berbagi Ilmu, Berbagi Pengalaman

Setelah kembali dari Canada, semangat untuk menularkan dan mempraktekkan apa yang telah saya dapat sangat tinggi. Saya dan mas Quddus, sebagai peserta Program *Good Governance and Social Accountability Tools* ini, ingin melakukan diskusi-diskusi terbatas dengan dosen-dosen ataupun dengan mahasiswa yang berminat. Agenda lainnya adalah mempraktekkan

metode akuntabilitas sosial di lingkungan kampus UIN Sunan Ampel.

Ternyata, prakteknya tidak semudah dan semulus apa yang telah diagendakan. *Pertama*, persoalan waktu. Kesibukan dan rutinitas kegiatan di kampus, seolah-olah waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tidak cukup bagi saya dan teman-teman untuk meluangkan waktu menerapkan metode-metode akuntabilitas sosial. *Kedua*, *political will* (kemauan). Asumsi saya, sekali lagi asumsi saya, penerapan metode akuntabilitas sosial (misalnya, *Community Scorecard*) untuk mengevaluasi standar layanan akademik/perpustakaan belum tentu diamini oleh pihak-pihak terkait, baik mahasiswa sebagai pengguna layanan ataupun karyawan sebagai penyedia layanan. Padahal, dalam teorinya, kemauan dan keikhlasan kedua pihak (penyedia dan pengguna) adalah faktor utama suksesnya proses *Community Scorecard*. Saya membayangkan, seandainya ada instruksi langsung dari pimpinan untuk menerapkan *Community Scorecard* guna menilai dan mengevaluasi layanan kampus maka tentu akan mudah dilaksanakan. Dengan begitu, pihak pimpinan, mahasiswa dan karyawan tahu sejauh mana kualitas layanan kampus.

Walaupun bukan atas inisiatif saya sendiri, kesempatan saya untuk berbagi pengalaman akhirnya datang juga. Sekitar awal bulan Juni 2013, saya ditelpon oleh salah satu staff SILE project yang meminta saya untuk menjadi fasilitator dalam *Workshop Good Governance and Social Accountability Tools* yang dilaksanakan selama tiga hari, 18-20 Juni di GreenSA UIN Sunan Ampel. Saya langsung menyanggupinya. Pemahaman saya, fasilitator bukanlah instruktur. Fasilitator hanyalah seorang yang memfasilitasi dan

menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan suatu acara, tapi bukan sebagai narasumber.

Seminggu sebelum acara dimulai, saya datang ke kantor SILE bertanya tentang persiapan acara. Saat itu saya diminta untuk mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan dan agar diserahkan ke kantor SILE, *as soon as possible*. Saya kaget. Spontan saya bilang ke mbak Pipit, salah seorang staff SILE, "lho mbak, kok saya harus presentasi? Saya kan hanya fasilitator?". "Lha fasilitator itu ya instruktur", Pipit menimpali. Saya baru tahu kalau fasilitator adalah sama dengan instruktur. Saya belum pernah punya pengalaman menjadi instruktur suatu *training* atau *workshop*. Apalagi pesertanya adalah mitra SILE baik dari CSO, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga komunitas. Tapi saya harus siap. Saya mulai membuka buku-buku referensi dan materi-materi yang saya dapat dari Canada.

Fasilitator selain saya, adalah saudara Dakhelan, dari FITRA Jawa Timur. Materi yang dipresentasikan adalah model-model atau bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan publik. Selain itu berbagi pengalaman tentang pengawasan berbasis masyarakat, seperti audit sosial *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan di daerah ring satu perusahaan migas yang ada di Tuban Jawa Timur, kemudian pengalaman sosial audit anggaran kesehatan di Sukabumi Jawa Barat. Adapun saya sendiri mempresentasikan materi tentang definisi, prinsip-prinsip dan motor penggerak *Good Governance*. *Kedua*, materi yang berkaitan dengan *Social Accountability*. Definisi akuntabilitas sosial dan macam-macamnya. Pilar-pilar *Social Accountability*, faktor-faktor keberhasilan

dan tantangan-tantangan dan menjelaskan metode-metode *Social Accountability*. Terakhir, saya melakukan simulasi *Community Scorecard* dengan fokus evaluasi kinerja Pokja selaku pendamping komunitas.

Metode *Score Card Community/Community Scorecard* ini adalah sebuah cara masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kinerja institusi pemerintah, swasta dan pemberi layanan publik. Metode ini dianggap cukup partisipatif karena, penyusunan instrumen, variabel dan besaran nilai ditentukan secara bersama-sama dan sangat mudah untuk dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Tujuan utamanya adalah memberi informasi kepada pengguna dan *provider* terhadap hak-hak dan kewajiban mereka, meningkatkan komunikasi dan hubungan antara kedua pihak, Memonitor dan meningkatkan kualitas layanan publik serta meningkatkan transparansi.

Berikut saya tulis sekilas 5 langkah CSC, *Pertama*, Persiapan (Menentukan tujuan, fokus lingkup dan lokasi). Bekerjasama dan memberi tahu pihak-pihak yang terlibat (pengguna dan *provider*), *men-training* fasilitator dan identifikasi kelompok-kelompok yang diprioritaskan dan persiapan logistik. *Kedua*, *Input Data* dan Informasi. Identifikasi informasi-informasi penting, seperti standar dan target kebijakan dan pelayanan, informasi anggaran dan keuangan. Bertemu dengan *provider* dan masyarakat untuk *sharing* informasi, validasi data dan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Kemudian inspeksi infrastruktur.

Ketiga, Pertemuan dengan komunitas (*user*). Membagi kelompok kemudian mengidentifikasi indikator yang akan dinilai dan menentukan skor yang disepakati. Diskusi tentang skor sangat penting, kenapa

mendapat skor tersebut dan siapa yang harus bertanggungjawab.

Keempat, Penyedia melakukan evaluasi diri. Prosesnya sama dengan yang dilakukan oleh komunitas user (langkah ketiga). Kelima, *Interface-meeting* (pertemuan semi pihak yang terlibat). Dalam langkah ini, setiap pihak mempresentasikan hasil skor, dialog dan memberikan saran serta kritikan. Kemudian menunjuk *volunteer* untuk *follow up*. Langkah terakhir, Follow Up dan Institusionalisasi. Mempublikasikan hasil dan rencana kedepan. Membentuk joint follow up untuk memonitor rencana kerja dan mengulang proses CSC setelah 6 atau 12 bulan untuk melihat perubahan yang telah dilakukan.

Dalam simulasi yang dilaksanakan pada workshop, proses CSC dibuat lebih singkat dan singkat dengan fokus penilaian adalah evaluasi kinerja Pokja selaku pendamping komunitas. Langkah pertama, membagi peserta menjadi 2 kelompok, *Provider*/Penyedia Layanan (Anggota Pokja) dan *User*/Pengguna layanan (Anggota komunitas). Kelompok komunitas juga dibagi menjadi 2, User A (terdiri dari komunitas dari pokja 1-4) dan user B (terdiri dari komunitas dari pokja 5-9). Kemudian ketiga kelompok tersebut, 1 *provider* dan 2 kelompok user sepakat bahwa indikator jenis layanan yang dinilai adalah Perencanaan dan Koordinasi, Kompetensi, Transparansi dan Komitmen. Rentang skor yang disepakati adalah 5: Baik Sekali, 4: Baik, 3: Sedang, 2: Kurang, 1: Kurang Sekali. Setelah itu masing-masing kelompok berdiskusi untuk melakukan penilaian/-penentuan skor sekaligus memberi rekomendasi.

Langkah selanjutnya, saya selaku fasilitator memandu proses *interface meeting*. Dari hasil presentasi

kelompok didapatkan hasil/skor sebagai berikut:

Tabel 3: Skor Hasil Presentasi Kelompok

Jenis Layanan	SKOR				Rekomendasi
	Provider (Pokja)	User (Komunitas)		Titik Temu	
		1	2		
Perencanaan dan Koordinasi	2	4	3	3	Tepat Waktu, Sinkronisasi Pokja+SILE workplan, Manajemen
Kompetensi	4	4	3	4	Saling melengkapi
Transparansi	3	3	3	3	Sosialisasi Informasi, Joint Workplan, Sharing informasi dengan pokja lain
Komitmen	3	5	4	4	Baik

Skor penilaian diatas menjadi acuan bagi semua pihak, terutama *provider* sebagai pihak yang dinilai untuk meningkatkan transparansi, pelayanan dan kinerjanya. Disisi lain, dengan adanya *interface-meeting*, para *user* bisa memberikan informasi tentang kebutuhan dan keperluan yang diperlukan, dan mereka bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pihak *provider*.

Pelatihan yang berlangsung serius tapi santai, dengan diselingi *joke-joke* segar sehingga suasana menjadi hidup dan tidak monoton. Peserta bisa menyampaikan semua pengalaman yang pernah dilakukan sehingga banyak pembelajaran menarik yang didapat oleh para peserta. Peserta dari komunitas menyatakan bahwa materi-materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk bahan pembelajaran di komunitas sehingga menjadi bekal untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Peserta dari unsur universitas dan SCO mengaku bahwa pelatihan ini sangat menarik dan

berguna untuk mengembangkan pengawasan berbasis masyarakat. Lega rasanya saya bisa berbagai ilmu dan pengalaman kepada teman-teman dari unsur dosen, pokja, CSO, dan komunitas. *Alhmdulillah.*

Penutup

Selama nyantri di St. Francis Xavier University, saya tidak hanya disugahi teori-teori ataupun konsep-konsep dari referensi yang berjibun. Tapi juga pengalaman dari teman-teman peserta lain yang berasal dari berbagai penjuru dunia merupakan suatu lembaran-lembaran ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai harganya. Dan lebih dari itu semua, contoh ril tata kelola yang baik dalam arti luas secara gamblang ada di depan mata. Bisa dilihat, dirasakan, dipraktekkan dan diikuti. Kampus yang sangat luas, bersih, dan rapi. Manajemen pembelajaran, layanan akademik, perpustakaan, asrama maupun kantin, bagi saya sangat memuaskan. Begitu juga dengan tata letak kotanya, rapi dan bersih. Saya bisa menyimpulkan, roda pemerintahan dan layanan publik di kota tersebut berjalan dengan baik.

Di akhir tulisan ini, saya berharap SILE mengadakan suatu workshop tentang *Good Governance and Social Accountability Tools* khusus bagi para pimpinan pengambil kebijakan dalam lingkup kampus UIN Sunan Ampel. Tujuannya agar mereka bisa memahami secara mendalam teori maupun praktek tentang tata kelola yang baik. Mereka juga bisa mempraktekkan metode-metode akuntabilitas sosial untuk melihat dan mengevaluasi kinerja ataupun layanan setiap unit kerja di Kampus. Sehingga para pimpinan tidak hanya terpaku dengan laporan-laporan yang tertulis yang notabene rawan manipulasi. {}